

Politik Representasi di Bawah Bayang-Bayang Patriarki: Tinjauan Literatur Kritis tentang Keterwakilan Substantif Perempuan di Parlemen

Ida Ayu Anggita Kusumadewi¹, Gede Indra Pramana², Piers Andreas Noak³

¹²³ Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

ARTICLE INFO

Article history:

Received Oktober, 2025

Revised Oktober, 2025

Accepted Oktober, 2025

Available online Oktober, 2025

kusumadewi022@student.unud.ac.id,
indraprama@unud.ac.id,
piersandreasnoak@unud.ac.id

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas
Pendidikan Ganesha.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji kesenjangan persisten antara keterwakilan deskriptif (jumlah) dan keterwakilan substantif (keberpihakan pada isu perempuan) di parlemen melalui tinjauan literatur kritis. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif studi literatur, artikel ini menjawab pertanyaan: Bagaimana literatur akademik menjelaskan mekanisme dan manifestasi struktur serta wacana patriarki yang beroperasi di parlemen sehingga menghambat transformasi keterwakilan deskriptif menjadi keterwakilan substantif? Hasil analisis menunjukkan bahwa hambatan tersebut bersifat sistemik dan saling memperkuat, terbagi menjadi dua dimensi utama. Pertama, hambatan struktural, yang mencakup peran partai politik sebagai *gatekeeper* yang bias, eksklusif perempuan dari jaringan informal *boys' club* yang seringkali berkelindan dengan korupsi, marginalisasi institusional perempuan ke dalam peran dan komite yang kurang strategis, serta penggunaan kekerasan terhadap perempuan dalam politik (VAWP) sebagai mekanisme pembungkaman. Kedua, hambatan diskursif, yang termanifestasi

dalam budaya debat parlementer yang maskulin dan konfrontatif, representasi media yang stereotipikal dan mendelegitimasi, serta pembungkaman dan devaluasi sistematis terhadap isu perempuan dalam proses legislatif. Studi ini menyimpulkan bahwa peningkatan jumlah perempuan saja tidak cukup untuk menjamin keterwakilan substantif. Diperlukan reformasi institusional yang mendalam, perubahan budaya politik, dan strategi perlawanan yang sadar dari para aktor politik untuk membongkar arsitektur kekuasaan patriarki yang mengakar di dalam parlemen.

Kata Kunci: Keterwakilan Substantif; Keterwakilan Deskriptif; Patriarki Politik; Parlemen

ABSTRACT

This study examines the persistent gap between descriptive representation (numbers) and substantive representation (partisanship on women's issues) in parliament through a critical literature review. Using qualitative literature research methods, this article answers the question: How does the academic literature explain the mechanisms and manifestations of patriarchal structures and discourses operating in parliament, thus hindering the transformation of descriptive representation into substantive representation? The analysis shows that these barriers are systemic and mutually reinforcing, divided into two main dimensions. First, structural barriers, which include the role of political parties as biased gatekeepers, the exclusion of women from informal boys' club networks that are often intertwined with corruption, the institutional marginalization of women to less strategic roles and committees, and the use of violence against women in politics (VAWP) as a silencing mechanism. Second, discursive barriers, which are manifested in a masculine and confrontational culture of parliamentary debate, stereotypical and delegitimizing media representation, and the systematic framing and devaluation of women's issues in the legislative process. This study

*Corresponding author

E-mail addresses: kusumadewi022@student.unud.ac.id

concludes that increasing the number of women alone is not sufficient to guarantee substantive representation. Deep institutional reform, a change in political culture, and a conscious strategy of resistance from political actors are needed to dismantle the patriarchal architecture of power that is rooted in parliament.

Keywords: *Substantive Representation; Descriptive Representation; Political Patriarchy; Parliament*

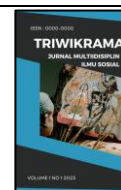
1. PENDAHULUAN

Perjuangan untuk kesetaraan gender dalam politik telah mencapai titik di mana kehadiran perempuan di lembaga-lembaga perwakilan tidak lagi menjadi anomali, melainkan sebuah keniscayaan normatif dalam diskursus demokrasi global. Peningkatan jumlah perempuan di parlemen, atau keterwakilan deskriptif, seringkali dirayakan sebagai indikator penting kemajuan demokrasi dan inklusivitas sistem politik (Zuniati dkk, 2024). Namun, dibalik angka-angka yang secara perlahan merangkak naik, terdapat sebuah paradoks yang mengkhawatirkan yaitu peningkatan kehadiran fisik perempuan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pengaruh mereka dalam mengadvokasi dan mengesahkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan perempuan. Kesenjangan antara kehadiran (*presence*) dan pengaruh (*influence*) ini menunjukkan adanya penghalang yang lebih dalam dan mengakar, yang beroperasi di bawah permukaan institusi demokrasi.

Secara global, data yang dikumpulkan oleh Inter-Parliamentary Union (IPU) dan UN Women melukiskan gambaran kemajuan yang lambat dan tidak merata. Dalam tiga dekade sejak Deklarasi Beijing 1995, persentase kursi parlemen yang diduduki perempuan di seluruh dunia telah meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 11,3% pada tahun 1995 menjadi 27,2% pada awal tahun 2025 (Inter-Parliamentary Union, 2025). Meskipun demikian, angka ini masih jauh dari paritas, dan laju kemajuan menunjukkan tanda-tanda stagnasi yang mengkhawatirkan. Laporan IPU mencatat bahwa kemajuan pada tahun 2024 adalah yang paling lambat sejak 2017, menandakan bahwa momentum positif mulai melemah (Inter-Parliamentary Union, 2025). Per 1 Januari 2025, laki-laki masih mendominasi posisi eksekutif dan legislatif dengan perbandingan lebih dari tiga banding satu (UN Women, 2025). Perempuan hanya menduduki 27,2% kursi parlemen dan 22,9% posisi menteri kabinet, angka yang terakhir bahkan menunjukkan penurunan dari 23,3% pada tahun sebelumnya (UN Women, 2025).

Disparitas regional juga sangat mencolok. Benua Amerika memimpin dengan rata-rata 35,4% keterwakilan perempuan di parlemen, sementara Asia, yang 30 tahun lalu memimpin dunia, kini tertinggal dengan mencatat pertumbuhan paling lambat (Inter-Parliamentary Union, 2025). Data ini mengindikasikan bahwa hambatan terhadap partisipasi politik perempuan tidak seragam, melainkan dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan sistem politik yang berbeda di setiap wilayah. Narasi kemajuan yang linear dan tak terhindarkan harus dievaluasi ulang yang terjadi adalah perjuangan yang berkelanjutan melawan resistensi yang semakin menguat. Stagnasi dan bahkan regresi di beberapa area menunjukkan bahwa strategi yang ada, seperti penerapan kuota, mungkin telah mencapai batas efektivitasnya tanpa diiringi oleh reformasi struktural yang lebih fundamental. Ini bukan lagi sekadar tantangan untuk mendaki bukit, melainkan upaya untuk mendobrak dinding institusional yang kokoh.

Tren ini juga tercermin di Indonesia dengan jelas. Meskipun kebijakan kuota afirmatif sebesar 30% telah diimplementasikan dalam undang-undang pemilu (Cahyowirawan dkk, 2025), pencapaiannya di tingkat nasional masih jauh dari target. Pada periode DPR RI 2019-2024, jumlah anggota parlemen perempuan hanya mencapai 112 orang dari total 575 kursi, atau setara dengan 19,48% (Komisi Pemilihan Umum, 2019). Hasil Pemilu 2024 menunjukkan sedikit peningkatan, dengan proyeksi 129 anggota parlemen perempuan dari 580 kursi, atau sekitar 22,24% (Perpustakaan DPR RI, 2024). Meskipun data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 17,32% pada 2018 menjadi 22,14% pada 2023 (Aberth, 2024), angka ini tetap berada di bawah target 30%. Fenomena ini melahirkan sebuah paradoks kuota yaitu kebijakan afirmatif berhasil meningkatkan angka keterwakilan secara absolut, namun gagal mencapai tujuannya secara substansial. Literatur menunjukkan bahwa kegagalan ini tidak hanya disebabkan oleh implementasi yang lemah, tetapi juga oleh interaksi negatif antara kebijakan



kuota dengan sistem politik yang lebih luas, terutama sistem proporsional daftar terbuka yang membuat kebijakan afirmatif menjadi lumpuh, serta budaya patriarki yang masih mengakar kuat di masyarakat dan partai politik (Cahyowirawan dkk, 2025).

Tabel 1 Perbandingan Keterwakilan Deskriptif Perempuan di Parlemen (Global, Regional, dan Indonesia, 2019-2025)

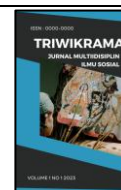
Wilayah	Persentase 2019	Persentase 2025 (per Jan/Okt)	Perubahan (%)
Global	24,3%	27,2%	+2,9
Amerika	30,6%	35,4%	+4,8
Eropa	28,6%	31,8%	+3,2
Asia Tenggara	21,2%	23,2%	+2,0
Indonesia (DPR RI)	20,52% (19,48% terpilih)	22,24% (terpilih)	+1,72

Sumber: diolah dari berbagai sumber oleh penulis, 2025. Data persentase global dan regional merujuk pada rata-rata per awal tahun yang dilaporkan. Data Indonesia merujuk pada hasil pemilu legislatif terkait.

Di balik dorongan global untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, terdapat sebuah janji implisit yaitu janji transformasi. Argumen keadilan (*justice argument*) menyatakan bahwa karena perempuan merupakan setengah dari populasi, mereka berhak atas setengah dari kursi kekuasaan (Alfath, 2020). Namun, argumen yang lebih pragmatis berfokus pada dampak. Teori politik feminis, terutama yang dipelopori oleh pemikir seperti Anne Phillips, berpendapat bahwa pengalaman hidup perempuan yang berbeda secara fundamental dari laki-laki terkait pengasuhan anak, pembagian kerja domestik, paparan terhadap kekerasan berbasis gender, dan lain-lain—membekali mereka dengan perspektif dan prioritas kebijakan yang unik (Rifaldi, 2023). Dengan demikian, kehadiran mereka di parlemen diharapkan tidak hanya simbolis, tetapi juga instrumental. Ekspektasinya adalah bahwa politisi perempuan akan menjadi agen perubahan, membawa isu-isu perempuan dari pinggiran ke pusat agenda kebijakan dan memastikan bahwa legislasi yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh warga negara (Rifaldi, 2023).

Meskipun ekspektasi ini logis, realitas di lapangan menunjukkan gambaran yang lebih kompleks dan seringkali mengecewakan. Sejumlah studi, termasuk di Indonesia, menemukan bahwa meskipun kebijakan kuota berhasil meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, efektivitas mereka dalam memengaruhi kebijakan yang berdampak pada perempuan tetap terbatas (Cahyowirawan dkk, 2025). Ada kesenjangan yang menganga antara keterwakilan deskriptif (kehadiran fisik) dan keterwakilan substantif (tindakan yang berpihak pada kepentingan perempuan). Peningkatan proporsi perempuan di parlemen ternyata tidak secara otomatis atau linear menghasilkan peningkatan perhatian terhadap isu-isu perempuan (Celis dkk, 2008).

Kesenjangan ini menimbulkan pertanyaan fundamental: mengapa penambahan jumlah tidak serta-merta menghasilkan perubahan substansi? Jawaban atas pertanyaan ini tidak dapat ditemukan hanya dengan menghitung kursi. Hal ini menuntut penyelidikan yang lebih dalam terhadap kotak hitam institusi parlemen itu sendiri. Artikel ini berargumen bahwa parlemen



bukanlah ruang netral dimana ide-ide diperdebatkan secara setara. Sebaliknya, parlemen adalah arena kekuasaan yang dibentuk oleh struktur, norma, dan wacana yang secara historis bersifat maskulin dan patriarkis.

Oleh karena itu, untuk memahami kegagalan transformasi dari representasi deskriptif ke substantif, penulis harus membongkar dan menganalisis bagaimana mekanisme dan manifestasi patriarki politik beroperasi di dalam koridor parlemen, yang secara aktif menghambat dan mendelegitimasi agensi politik perempuan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana literatur akademik menjelaskan mekanisme dan manifestasi struktur serta wacana patriarki yang beroperasi di parlemen sehingga menghambat transformasi keterwakilan deskriptif (kehadiran) perempuan menjadi keterwakilan substantif (keberpihakan pada isu perempuan)?

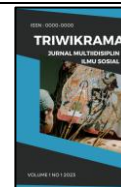
TINJAUAN PUSTAKA

Untuk memahami kompleksitas kegagalan transformasi dari sekadar kehadiran (*presence*) menjadi pengaruh (*influence*) nyata dalam politik, diperlukan landasan teoritis yang kokoh. Literatur keterwakilan politik perempuan telah berevolusi secara signifikan, beralih dari konsep dasar menuju perdebatan yang lebih kritis. Tinjauan ini memetakan tiga pilar teoritis utama. Dimulai dari kerangka kerja fundamental Hanna Pitkin yang membedah konsep representasi deskriptif dan substantif. Kemudian, jembatan konseptual dari Anne Phillips hadir melalui *politics of presence*, yang mengargumentasikan mengapa kehadiran fisik perempuan penting untuk mencapai perubahan substantif. Terakhir, analisis ini menelusuri evolusi perdebatan dari teori *critical mass*, yang mengandalkan jumlah, menuju konsep *critical actors*, yang lebih menekankan pada agensi dan strategi individu dalam mempengaruhi kebijakan.

Konsep Representasi Deskriptif dan Substantif Hanna Pitkin

Landasan dari hampir semua diskusi modern tentang keterwakilan politik diletakkan oleh Hanna Fenichel Pitkin dalam karyanya yang monumental, *The Concept of Representation* (1967). Pitkin secara sistematis membedah konsep representasi menjadi empat dimensi: formal, simbolis, deskriptif, dan substantif (Alfath, 2020). Untuk tujuan analisis ini, dua dimensi terakhir menjadi yang paling relevan.

- 1) Representasi Deskriptif dipahami sebagai hubungan berdiri untuk (*stands for*) (Alfath, 2020). Dimensi ini berfokus pada sejauh mana sebuah badan perwakilan mencerminkan komposisi demografis, sosial, dan identitas dari masyarakat yang diwakilinya. Dalam konteks gender, representasi deskriptif mengukur proporsi perempuan di parlemen (Anggita & Ratnawati, 2023). Argumen utamanya adalah bahwa sebuah lembaga tidak dapat dianggap benar-benar representatif jika secara drastis gagal mencerminkan keragaman populasi yang seharusnya dilayaninya. Ini adalah representasi yang berfokus pada *siapa* wakilnya.
- 2) Representasi Substantif, di sisi lain, adalah tentang hubungan bertindak untuk (*acts for*) (Alfath, 2020). Dimensi ini tidak lagi mempersoalkan identitas perwakilan, melainkan tindakan dan kinerjanya. Seorang perwakilan dikatakan substantif jika ia bertindak demi kepentingan terbaik dari yang diwakili, dengan cara yang responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi mereka (Sibarani, 2024). Ini adalah representasi yang berfokus pada *apa yang dilakukan* oleh wakil rakyat, seperti memperjuangkan kebijakan, mengadvokasi isu-isu tertentu, dan memastikan bahwa suara konstituennya hadir dalam proses pembuatan kebijakan publik (Alfath, 2020).



Kerangka kerja Pitkin ini sangat fundamental karena ia menyediakan bahasa dan kategori analitis untuk mengidentifikasi kesenjangan yang menjadi inti dari penelitian ini adalah adanya representasi deskriptif tidak secara otomatis menjamin adanya representasi substantif.

Dari Kehadiran ke Tindakan: Argumen Anne Phillips dan Teori *Politics of Presence*

Jika Pitkin memisahkan kedua konsep tersebut secara analitis, Anne Phillips dalam bukunya *The Politics of Presence* (1995) berusaha membangun jembatan kausal di antara keduanya (Rifaldi, 2023). Phillips mengajukan argumen yang kuat mengapa representasi deskriptif (kehadiran perempuan) penting untuk mencapai representasi substantif (tindakan untuk perempuan). Argumennya tidak didasarkan pada esensialisme biologis, melainkan pada pengalaman sosial yang berbeda secara sistematis antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat yang terstruktur secara gender (Wängnerud, 2009).

Phillips berpendapat bahwa karena perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman hidup yang berbeda terkait dengan hal-hal seperti pengasuhan anak, pembagian kerja berbayar dan tidak berbayar, paparan terhadap kekerasan dan pelecehan seksual, serta posisi mereka dalam struktur kekuasaan ekonomi dan politik, maka politisi perempuan secara unik lebih siap untuk memahami dan mengartikulasikan kepentingan yang muncul dari pengalaman-pengalaman tersebut (Rifaldi, 2023). Dengan kata lain, teori *politics of presence* memprediksi adanya hubungan yang erat antara jumlah perempuan di parlemen dan sejauh mana kepentingan perempuan digaungkan dan diperjuangkan di sana (Rifaldi, 2023). Kehadiran fisik menjadi penting bukan hanya untuk alasan simbolis, tetapi karena ia membawa perspektif dan pengetahuan yang sebelumnya absen dari arena politik yang didominasi laki-laki.

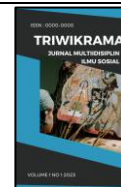
Namun, teori ini juga membuka ruang bagi kritik. Asumsi bahwa ada kepentingan perempuan yang tunggal dan dapat diwakili telah ditantang oleh para pemikir feminis yang menekankan interseksionalitas bahwa identitas perempuan juga dibentuk oleh ras, kelas, etnisitas, dan ideologi (Celis, 2008). Hal ini menimbulkan ketegangan teoretis yang penting yaitu bagaimana keterwakilan substantif dapat diukur jika substansi itu sendiri (kepentingan perempuan) bersifat cair, kontekstual, dan seringkali diperebutkan? Kegagalan transformasi dari deskriptif ke substantif mungkin tidak hanya disebabkan oleh hambatan patriarki, tetapi juga oleh asumsi awal penulis yang terlalu menyederhanakan tentang apa itu kepentingan perempuan. Bisa jadi yang dilihat bukanlah sebuah kegagalan representasi, melainkan representasi yang akurat dari keragaman ideologi yang ada di kalangan politisi perempuan itu sendiri, di mana beberapa di antaranya mungkin mendorong agenda konservatif (Celis dkk, 2008).

Debat Kritis Seputar Teori *Critical Mass* dan *Critical Actors*

Prediksi Phillips bahwa peningkatan jumlah akan meningkatkan substansi melahirkan turunan teoretis yang sangat berpengaruh, yaitu Teori Massa Kritis (*Critical Mass Theory*). Dipinjam dari ilmu fisika dan studi organisasi oleh sarjana seperti Rosabeth Moss Kanter (1977) dan dipopulerkan dalam studi gender oleh Drude Dahlerup (1988), teori ini mengemukakan bahwa perempuan perlu mencapai proporsi numerik tertentu (seringkali disebut sekitar 30%) dalam sebuah lembaga sebelum mereka dapat bergerak dari status token (simbol) menjadi kelompok yang berpengaruh dan mampu mengubah budaya serta hasil kebijakan institusi tersebut (Celis, 2008). Logikanya adalah bahwa ketika jumlah mereka cukup besar, perempuan akan merasa lebih aman untuk berbicara, dapat membentuk koalisi, dan memiliki kekuatan kolektif untuk menantang norma-norma yang ada (Childs & Krook, 2006).

*Corresponding author

E-mail addresses: kusumadewi022@student.unud.ac.id



Namun, seiring berjalannya waktu, bukti empiris dari berbagai negara menunjukkan hasil yang beragam. Banyak studi gagal menemukan hubungan linear yang jelas antara pencapaian massa kritis dan peningkatan legislasi pro-perempuan (Celis dkk, 2008). Krisis kepercayaan terhadap determinisme numerik ini memicu pergeseran paradigma teoretis yang signifikan, dari massa kritis ke aktor kritis (*critical actors*) (Celis dkk, 2008).

Pendekatan aktor kritis, yang dikembangkan oleh Sarah Childs dan Mona Lena Krook, mengalihkan fokus analisis. Pertanyaannya bukan lagi kapan perempuan membuat perbedaan? (yang menyiratkan ambang batas numerik), melainkan bagaimana representasi substantif perempuan terjadi, dan oleh siapa? (Celis dkk, 2008). Pendekatan ini memiliki beberapa keunggulan:

- 1) Menghindari Esensialisme: Ia tidak mengasumsikan bahwa semua politisi perempuan akan bertindak untuk perempuan, atau bahwa semua politisi laki-laki tidak akan melakukannya. Ia mengakui bahwa agensi dan komitmen ideologis lebih penting daripada identitas gender semata (Celis dkk, 2008).
- 2) Fokus pada Proses: Ia mendorong analisis yang lebih mendalam tentang konteks, strategi, dan tindakan spesifik (*critical acts*) yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memajukan kepentingan perempuan, terlepas dari jumlah total perempuan di parlemen (Childs & Krook, 2009).
- 3) Mengakui Peran Sekutu: Ia secara eksplisit membuka ruang untuk menganalisis peran politisi laki-laki sebagai sekutu potensial dalam perjuangan untuk kesetaraan gender (Broadbent, 2019).

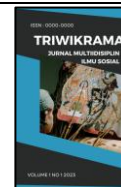
Pergeseran dari massa ke aktor ini merupakan evolusi teoretis yang krusial. Ia membebaskan analisis dari pencarian angka ajaib dan mengarahkannya pada penyelidikan yang lebih kaya dan kontekstual tentang dinamika kekuasaan, agensi politik, dan pembentukan koalisi di dalam institusi parlemen. Ini menyiratkan bahwa solusi untuk meningkatkan keterwakilan substantif tidak terletak pada pemenuhan kuota semata, tetapi pada pemberdayaan aktor-aktor strategis dan penciptaan kondisi institusional yang memungkinkan tindakan-tindakan kritis untuk berhasil.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi literatur kritis (*critical literature review*). Metode ini dipilih karena paling sesuai untuk menjawab rumusan masalah yang bersifat eksploratif dan sintetik, yang bertujuan untuk memahami bagaimana literatur akademik yang ada menjelaskan sebuah fenomena kompleks. Studi literatur ini tidak hanya merangkum penelitian yang ada, tetapi juga secara kritis menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesis temuan-temuan dari berbagai sumber untuk membangun argumen yang koheren dan komprehensif.

Proses penelitian ini melibatkan beberapa tahapan sistematis. Pertama, identifikasi dan pengumpulan literatur yang relevan, yang dalam konteks ini telah disediakan dalam bentuk kumpulan materi penelitian. Sumber-sumber ini mencakup artikel jurnal akademik, buku, laporan dari organisasi internasional seperti Inter-Parliamentary Union (IPU) dan UN Women, serta data dari lembaga statistik nasional. Kedua, dilakukan analisis tematik terhadap seluruh materi. Setiap sumber dibaca dan dikodekan untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci, argumen utama, dan temuan empiris yang berkaitan dengan keterwakilan deskriptif, keterwakilan substantif, dan manifestasi patriarki di parlemen.

Ketiga, temuan-temuan yang telah dikodekan kemudian dikelompokkan ke dalam tema-tema besar yang muncul secara berulang dari literatur. Proses ini menghasilkan identifikasi dua kategori utama hambatan: hambatan struktural (misalnya, peran partai politik, jaringan informal,



kekerasan politik) dan hambatan diskursif (misalnya, budaya debat, representasi media, pembingkaihan isu). Keempat, dilakukan proses sintesis di mana hubungan antar tema dianalisis untuk membangun sebuah narasi analitis yang utuh. Sintesis ini tidak hanya memaparkan temuan, tetapi juga menafsirkan bagaimana berbagai mekanisme patriarki tersebut saling terkait dan secara kolektif menghambat transformasi dari keterwakilan deskriptif menjadi substantif. Dengan demikian, metode ini memungkinkan penelitian untuk melampaui deskripsi sederhana dan menawarkan penjelasan yang mendalam dan bernuansa tentang masalah yang diteliti, sesuai dengan tujuan dari tinjauan literatur kritis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL

Mekanisme dan Manifestasi Patriarki di Parlemen

Analisis terhadap literatur akademik mengungkapkan bahwa parlemen bukanlah arena yang netral gender. Sebaliknya, ia menjadi sebuah institusi yang sarat dengan struktur kekuasaan, norma, dan praktik yang secara historis dibentuk oleh dan untuk laki-laki. Literatur secara konsisten mengidentifikasi berbagai mekanisme dan manifestasi patriarki yang beroperasi untuk menghambat efektivitas politik perempuan. Temuan ini dapat dikategorikan ke dalam dua dimensi utama yang saling terkait: hambatan struktural dan hambatan diskursif.

1) Hambatan Struktural: Arsitektur Kekuasaan Maskulin

Hambatan struktural merujuk pada aturan main, baik formal maupun informal, serta pengaturan kelembagaan yang secara sistematis menempatkan perempuan pada posisi tidak menguntungkan di parlemen. Ini bisa berwujud sistem pemilu yang tidak ramah perempuan, proses rekrutmen politik internal partai yang bias, atau alokasi sumber daya kampanye yang tidak setara. Selain itu, budaya politik yang sangat maskulin, jam kerja parlemen yang seringkali tidak fleksibel, dan kurangnya fasilitas pendukung (seperti penitipan anak) juga berkontribusi. Akibatnya, hambatan ini tidak hanya mempersulit perempuan untuk terpilih, tetapi juga membatasi kemampuan mereka berpartisipasi penuh dan memengaruhi kebijakan secara efektif begitu menjabat.

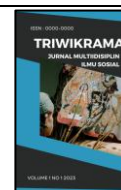
Gerbang Partai dan Jaringan *Boys' Club*: Politik Informal, Patronase, dan Eksklusi

Tulisan ini secara luas mengakui bahwa partai politik berfungsi sebagai *gatekeeper* atau penjaga gerbang utama yang mengontrol akses individu ke dalam arena politik elektoral (Fleschenberg & Bari, 2015). Proses rekrutmen dan seleksi calon legislatif di dalam partai seringkali bersifat tertutup, tidak transparan, dan sangat dipengaruhi oleh bias gender (FREE Policy Briefs, 2021). Para pemimpin partai, yang mayoritas adalah laki-laki, cenderung memilih kandidat yang mencerminkan diri mereka sendiri, sebuah fenomena yang didorong oleh faktor-faktor seperti kurangnya dorongan bagi perempuan untuk maju dan persepsi bahwa perempuan kurang berkualitas (FREE Policy Briefs, 2021).

Di balik proses formal partai, beroperasi jaringan informal yang jauh lebih sulit ditembus, yang sering disebut sebagai *boys' club* atau *old boys' club* (Cullen & Perez-Truglia, 2021). Jaringan ini adalah manifestasi dari homoseksualitas, kecenderungan laki-laki untuk membentuk ikatan eksklusif dengan sesama laki-laki. Jaringan ini menjadi sangat kuat dalam sistem politik yang diwarnai oleh patronase, klientelisme, dan korupsi (O'Brien & Bjarnegård, 2021). Penelitian lintas negara secara konsisten menunjukkan hubungan negatif yang kuat antara tingkat korupsi yang tinggi dan tingkat keterwakilan perempuan yang rendah (O'Brien & Bjarnegård, 2021). Hal ini terjadi karena jaringan korup membutuhkan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi dan

*Corresponding author

E-mail addresses: kusumadewi022@student.unud.ac.id



keengganan untuk menerima orang luar yang dapat membocorkan praktik ilegal mereka (O'Brien & Bjarnegård, 2021). Perempuan, yang seringkali dipersepsikan sebagai orang luar dan kurang korup, secara sistematis dikecualikan dari jaringan ini (O'Brien & Bjarnegård, 2021). Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya menguntungkan laki-laki yang lebih tua, tetapi laki-laki dari segala usia, yang mengindikasikan bahwa ini adalah masalah *boys' network* secara umum yang terus meregenerasi dirinya dengan merekrut anggota laki-laki yang lebih muda (O'Brien & Bjarnegård, 2021). Eksklusi dari jaringan informal ini tidak hanya menghalangi perempuan untuk dicalonkan, tetapi juga membatasi akses mereka terhadap sumber daya, informasi, dan dukungan politik yang krusial untuk menjadi legislator yang efektif setelah terpilih.

Institusionalisasi Bias: Marginalisasi dalam Peran, Komite, dan Kepemimpinan

Bahkan ketika perempuan berhasil melewati gerbang partai dan terpilih, mereka menghadapi arsitektur kekuasaan internal parlemen yang juga bias gender. Salah satu manifestasi paling jelas dari hal ini adalah penempatan anggota parlemen perempuan dalam peran dan komite. Data global dari IPU dan UN Women menunjukkan pola yang konsisten: perempuan secara tidak proporsional ditempatkan di kementerian dan komite yang dianggap sebagai domain feminin atau lunak, seperti urusan perempuan dan kesetaraan gender (86,7% dipimpin perempuan), urusan keluarga dan anak (71,4%), dan urusan sosial (55,6%) (UN Women, 2025). Sebaliknya, mereka sangat kurang terwakili di pos-pos strategis yang dianggap maskulin atau keras, yang mengontrol agenda nasional dan prioritas global, seperti pertahanan (13,0% perempuan), urusan dalam negeri (13,2%), dan urusan keuangan (16,4%) (UN Women, 2025).

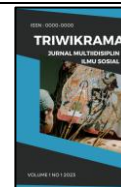
Penempatan ini bukan tanpa konsekuensi. Ia menciptakan sebuah *ghettoisasi* legislatif, dimana perempuan terkonsentrasi di area-area yang seringkali dianggap kurang prestisius, memiliki anggaran lebih kecil, dan pengaruh yang lebih terbatas terhadap kebijakan negara secara keseluruhan. Selain itu, perempuan juga menghadapi kesulitan dalam mencapai posisi kepemimpinan kunci di dalam parlemen, seperti ketua komite atau pimpinan fraksi (Itzkovitch-Malka & Oshri, 2025). Status marginal ini, baik yang bersifat personal (kurangnya masa jabatan), terkait partai (posisi tidak aman dalam daftar calon), maupun struktural (berada di oposisi) secara signifikan membatasi kapasitas mereka untuk menetapkan agenda, memengaruhi proses legislatif, dan mengubah institusi dari dalam (Itzkovitch-Malka & Oshri, 2025).

Kekerasan dan Intimidasi sebagai Mekanisme Pembungkaman Politik

Mekanisme patriarki yang paling brutal adalah penggunaan kekerasan dan intimidasi untuk membungkam dan menghalangi partisipasi politik perempuan. Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Politik (VAWP) adalah fenomena global yang terdokumentasi dengan baik. Sebuah studi IPU yang mengejutkan menemukan bahwa 81,8% anggota parlemen perempuan di seluruh dunia pernah mengalami kekerasan psikologis, 44,4% menerima ancaman pembunuhan, pemerkosaan, atau penculikan, dan 25,5% mengalami kekerasan fisik di dalam gedung parlemen itu sendiri (Parliamentarians for Global Action, 2023).

Kekerasan ini dapat terjadi baik secara langsung (serangan fisik, pelecehan seksual) maupun tidak langsung (ancaman, ujaran kebencian online, kampanye disinformasi berbasis gender) (Inter-Parliamentary Union, 2025). Tujuannya jelas untuk mendelegitimasi, mengintimidasi, dan pada akhirnya memaksa perempuan keluar dari ruang politik (UN Women, 2024). VAWP bukan sekadar tindakan kriminal biasa; ia adalah strategi politik yang digunakan untuk mempertahankan tatanan kekuasaan yang ada dan memastikan bahwa politik tetap menjadi domain laki-laki. Dampaknya sangat merusak, tidak hanya bagi individu korban, tetapi juga bagi demokrasi itu sendiri, karena ia menciptakan lingkungan yang penuh ketakutan yang menghalangi perempuan untuk mencalonkan diri atau berbicara secara bebas, sehingga secara efektif membungkam separuh populasi (Parliamentarians for Global Action, 2023).

2) Hambatan Diskursif: Bahasa dan Wacana Kekuasaan



Hambatan diskursif adalah rintangan tak terlihat yang berakar pada bahasa, komunikasi, dan representasi simbolik. Ini adalah cara-cara halus di mana masyarakat menggunakan wacana untuk memperkuat stereotip gender yang ada. Contohnya, media mungkin lebih sering menyoroti penampilan atau kehidupan pribadi pemimpin perempuan daripada kompetensi dan gagasan mereka. Praktik ini secara sistematis mendelegitimasi otoritas perempuan, membuat kepemimpinan mereka tampak kurang sah atau kredibel dibandingkan laki-laki. Akibatnya, agenda kebijakan yang mereka usung, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan, keluarga, atau perawatan, sering kali dianggap lunak atau dipinggirkan dari prioritas utama, menghalangi kemajuan sosial yang inklusif.

Budaya Debat Parlementer yang Maskulin: Agresivitas sebagai Norma dan Dampaknya

Parlemen seringkali digambarkan sebagai arena pertarungan verbal. Literatur tentang wacana parlementer mengidentifikasi bahwa norma interaksi di dalam ruang debat secara inheren bersifat maskulin (Shaw, 2000). Gaya komunikasi yang dihargai seringkali adalah yang konfrontatif, agresif, asertif, dan kompetitif, sifat-sifat yang secara stereotipikal diasosiasikan dengan maskulinitas (Shaw, 1998). Studi-studi linguistik menunjukkan bahwa anggota parlemen laki-laki cenderung lebih sering menginterupsi pembicara lain, terutama pembicara perempuan, sehingga menyulitkan perempuan untuk memegang lantai (*hold the floor*) dan menyampaikan argumen mereka secara utuh (Shaw, 2000).

Budaya ini menempatkan politisi perempuan dalam posisi yang sulit. Mereka dihadapkan pada dilema strategis, jika mereka mengadopsi gaya debat yang agresif dan maskulin, mereka berisiko dicap sebagai tidak feminin, kasar, atau terlalu ambisius, yang dapat memicu reaksi negatif. Namun, jika mereka menggunakan gaya komunikasi yang lebih kolaboratif atau komunal, yang secara stereotipikal dianggap feminin, mereka berisiko dianggap lemah, tidak tegas, dan tidak efektif sebagai pemimpin (Shaw, 2013). Beberapa penelitian bahkan menunjukkan bahwa untuk dapat bertahan dan meningkatkan prestise mereka di parlemen, politisi perempuan secara bertahap cenderung mengurangi suara feminin mereka dan beradaptasi dengan norma maskulin yang dominan, sebuah proses yang dapat menjauhkan mereka dari tujuan awal representasi substantif.

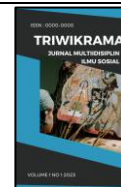
Representasi Media yang Stereotipikal: Jebakan *Double Bind* dan Delegitimasi

Media massa memainkan peran sentral dalam membentuk persepsi publik tentang politisi. Sebuah meta-analisis komprehensif terhadap puluhan studi menunjukkan bahwa media secara konsisten meliput politisi perempuan secara berbeda dan seringkali bias (Van der Pas & Aaldering, 2020). Pola yang paling umum ditemukan adalah fokus yang tidak proporsional pada penampilan fisik, pakaian, status perkawinan, dan kehidupan keluarga politisi perempuan, sementara substansi kebijakan dan kompetensi profesional mereka seringkali diabaikan atau ditempatkan di urutan kedua (Van der Pas & Aaldering, 2020).

Liputan ini menjebak perempuan dalam apa yang dikenal sebagai *double bind*: mereka dikritik karena melanggar norma gender jika mereka menunjukkan sifat-sifat kepemimpinan yang kuat (dianggap tidak seperti perempuan seharusnya), tetapi juga dianggap tidak kompeten jika mereka menunjukkan sifat-sifat yang sesuai dengan stereotip feminin (dianggap terlalu emosional untuk memimpin) (Ozer, 2023). Media juga cenderung memberikan liputan viabilitas yang lebih negatif kepada kandidat perempuan, lebih sering mempertanyakan peluang mereka untuk menang, yang dapat memengaruhi persepsi pemilih dan donor (Van der Pas & Aaldering, 2020). Representasi yang stereotipikal ini tidak hanya merugikan karir individu politisi perempuan, tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas: ia secara terus-menerus memperkuat asosiasi bahwa politik

*Corresponding author

E-mail addresses: kusumadewi022@student.unud.ac.id



adalah ranah maskulin, yang pada gilirannya dapat mengecilkan ambisi politik perempuan generasi berikutnya dan membuat elite partai enggan mencalonkan mereka (Trabelsi, 2023).

Pembingkaihan dan Devaluasi Isu Perempuan dalam Proses Legislatif

Hambatan diskursif yang paling langsung memengaruhi keterwakilan substantif adalah cara isu perempuan dibingkai dan diperlakukan dalam proses legislatif. Literatur menunjukkan bahwa isu-isu yang secara tradisional diasosiasikan dengan perempuan seperti kesehatan reproduksi, pengasuhan anak, cuti melahirkan, kesetaraan upah, dan kekerasan dalam rumah tangga, seringkali diberi label sebagai isu khusus atau *niche*, bukan sebagai isu sentral yang menyangkut ekonomi dan kesejahteraan nasional (Volden dkk, 2018).

Pembingkaihan ini memiliki konsekuensi nyata. Sebuah studi longitudinal yang sangat ekstensif terhadap puluhan ribu RUU di Kongres Amerika Serikat selama lebih dari 40 tahun memberikan bukti kuantitatif yang kuat tentang devaluasi sistematis ini (Volden dkk, 2018). Studi tersebut menemukan bahwa sementara sekitar 4% dari semua RUU yang diajukan berhasil menjadi undang-undang, tingkat keberhasilan ini anjlok menjadi hanya 2% untuk RUU yang dikategorikan sebagai isu perempuan. Yang lebih mengejutkan, tingkat keberhasilan turun lagi menjadi hanya 1% jika RUU isu perempuan tersebut disponsori oleh seorang anggota Kongres perempuan (Volden dkk, 2018). Temuan ini menunjukkan adanya bias kelembagaan yang mendalam dimana proposal kebijakan yang paling diprioritaskan oleh perempuan secara sistematis diabaikan dan digagalkan, seringkali pada tahap komite. Ini adalah manifestasi paling nyata dari bagaimana wacana patriarki yang menganggap isu perempuan sebagai isu sekunder diterjemahkan menjadi hasil kebijakan yang konkret, yang secara langsung menghalangi terwujudnya keterwakilan substantif.

PEMBAHASAN

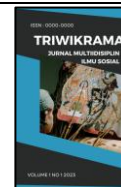
Analisis Kritis terhadap Kegagalan Transformasi Representasi

Hasil studi literatur yang dipaparkan di atas tidak hanya menyajikan daftar hambatan, tetapi juga mengungkapkan sebuah sistem patriarki politik yang kompleks, adaptif, dan saling memperkuat. Kegagalan transformasi dari keterwakilan deskriptif ke substantif bukanlah akibat dari satu faktor tunggal, melainkan hasil dari interaksi dinamis antara struktur institusional yang bias dan wacana kekuasaan yang mendelegitimasi. Pembahasan ini akan menganalisis secara kritis bagaimana mekanisme-mekanisme tersebut bekerja secara sinergis, mengapa pendekatan yang hanya berfokus pada angka tidak memadai, dan bagaimana agensi politik dapat menavigasi lanskap yang menantang ini.

Sinergi Negatif: Keterkaitan Erat antara Hambatan Struktural dan Diskursif

Analisis yang lebih dalam menunjukkan bahwa hambatan struktural dan diskursif tidak beroperasi secara terpisah; mereka menciptakan sebuah ekosistem patriarki yang resilien melalui sinergi negatif. Jaringan informal *boys' club* (struktural) tidak hanya mengecualikan perempuan dari lingkaran kekuasaan, tetapi juga diperkuat oleh wacana media yang secara konsisten menggambarkan perempuan sebagai pemimpin yang kurang kompeten atau kurang serius (diskursif) (O'Brien & Bjarnegård, 2021). Hal ini menciptakan lingkaran setan yaitu elite partai (*gatekeeper* struktural) mungkin ragu untuk mencalonkan perempuan karena mereka percaya, didorong oleh narasi media, bahwa pemilih tidak akan memilih perempuan sebuah fenomena yang disebut *pragmatic bias* (Corbett dkk, 2022).

Setelah terpilih, seorang politisi perempuan yang mencoba mengangkat isu perempuan (agensi) akan berhadapan dengan budaya debat yang meremehkan dan menganggapnya lunak (diskursif) (Shaw, 2000). Upayanya kemudian diliput oleh media dengan bingkai yang sama, yang pada gilirannya memperkuat posisinya yang termarginalisasi di dalam komite-komite yang kurang berpengaruh (struktural) (Itzkovitch-Malka & Oshri, 2025). Dengan demikian, struktur dan wacana saling melegitimasi. Struktur yang bias gender menghasilkan wacana yang bias gender, dan



wacana tersebut kemudian digunakan untuk menjustifikasi dan melanggengkan struktur yang ada. Ini menjelaskan mengapa sistem ini begitu sulit diubah: menyerang satu aspek saja (misalnya, hanya meningkatkan jumlah perempuan) tidak akan cukup untuk meruntuhkan keseluruhan bangunan.

Lebih jauh, sistem ini mempertahankan dirinya dengan menggunakan wacana yang tampak netral seperti meritokrasi dan pengalaman. Namun, literatur menunjukkan bahwa konsep merit itu sendiri seringkali didefinisikan secara maskulin. Jaringan *boys' club* adalah mekanisme dimana pengalaman, kepercayaan, dan kapital politik sebagai kriteria kunci untuk kemajuan karir yang dibangun dan didistribusikan secara eksklusif di antara laki-laki (O'Brien & Bjarnegård, 2021). Perempuan, yang secara sistematis dikecualikan dari jaringan ini, secara inheren akan dinilai kurang berpengalaman atau tidak terpercaya, bukan karena kurangnya kemampuan inheren, tetapi karena kurangnya akses. Ini adalah bentuk diskriminasi struktural yang tersembunyi di balik bahasa meritokrasi yang objektif, sebuah contoh bagaimana wacana digunakan untuk menutupi dan mereproduksi ketidaksetaraan struktural.

Mengapa *Critical Mass* Saja Tidak Cukup? Sebuah Evaluasi Ulang

Temuan tentang sifat sistemik patriarki politik memberikan penjelasan yang kuat mengapa teori *critical mass* seringkali gagal terbukti di lapangan. Logika *critical mass* yang berfokus pada angka mengasumsikan bahwa parlemen adalah sebuah wadah yang relatif netral di mana penambahan elemen baru (perempuan) dalam jumlah yang cukup akan mengubah campuran secara keseluruhan. Namun, analisis literatur menunjukkan bahwa parlemen bukanlah wadah netral, melainkan sebuah struktur dengan aturan main, norma, dan budaya yang sudah bias sejak awal.

Dalam konteks ini, penambahan jumlah perempuan saja tidak akan cukup untuk membongkar fondasi patriarki tersebut. Tanpa perubahan pada aturan main informal (jaringan *boys' club*), norma-norma diskursif (budaya debat, liputan media), dan alokasi kekuasaan formal (posisi di komite strategis), bahkan mayoritas perempuan di parlemen pun bisa jadi tidak efektif. Mereka mungkin menemukan diri mereka terisolasi, terpinggirkan, dan dipaksa untuk beradaptasi dengan sistem yang ada daripada mengubahnya. Hal ini menguatkan validitas pergeseran teoritis dari *critical mass* ke *critical actors* (Celis dkk, 2008). Fokusnya harus pada bagaimana aktor-aktor yang memiliki komitmen ideologis, terlepas dari jumlah mereka, dapat secara strategis melakukan tindakan-tindakan kritis (*critical acts*) untuk menantang dan mengubah institusi dari dalam (Childs & Krook, 2009).

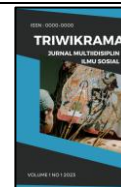
Salah satu dilema strategis yang paling tajam yang muncul dari analisis ini adalah paradoks spesialisasi. Politisi perempuan seringkali didorong, baik oleh ekspektasi internal maupun eksternal, untuk menjadi ahli dan juru bicara untuk isu perempuan (Volden dkk, 2018). Namun, data dari Kongres AS menunjukkan bahwa spesialisasi ini justru menjadi sebuah jebakan (Volden dkk, 2018). Dengan memfokuskan energi dan modal politik mereka pada isu-isu ini, mereka secara efektif mengurung diri di area kebijakan yang secara sistematis didevaluasi dan digagalkan oleh institusi. Mereka menjadi ratu di kerajaan kecil yang tidak memiliki kekuatan nyata untuk memengaruhi agenda nasional yang lebih luas. Ini menciptakan pilihan yang mustahil: untuk menjadi efektif dalam sistem yang ada, mereka mungkin harus meninggalkan isu perempuan dan membuktikan diri di arena keras yang didominasi laki-laki, sebuah tindakan yang justru akan mengkhianati tujuan awal dari keterwakilan substantif itu sendiri.

Peran Krusial Aktor, Aliansi, dan Gerakan Perempuan dalam Menavigasi Struktur Patriarki

Meskipun menghadapi lanskap yang penuh tantangan, literatur juga menunjukkan bahwa politisi perempuan bukanlah korban yang pasif. Mereka secara aktif mengembangkan berbagai

*Corresponding author

E-mail addresses: kusumadewi022@student.unud.ac.id



strategi untuk menavigasi dan melawan struktur patriarki. Studi kasus menunjukkan adanya tiga kategori respons politisi perempuan terhadap patriarki yaitu *risk-takers* (pengambil risiko yang secara radikal menantang norma), *opportunity seekers* (pencari peluang yang beradaptasi untuk mendapatkan kekuasaan), dan *opt-to-disengage* (mereka yang memilih keluar karena tidak nyaman) (Volden dkk, 2018). Untuk menjadi efektif, agensi individu harus diperkuat oleh tindakan kolektif. Salah satu strategi yang paling sering dikutip dan terbukti efektif adalah pembentukan kaukus perempuan lintas partai.⁷ Kaukus ini berfungsi sebagai ruang aman untuk berbagi pengalaman, membangun solidaritas, dan yang terpenting, menyusun agenda bersama dan strategi lobi yang melampaui perbedaan ideologi partai. Dengan berbicara sebagai satu blok, mereka dapat meningkatkan kekuatan tawar mereka secara signifikan.

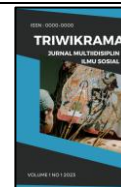
Selain itu, pentingnya membangun aliansi dengan kolega laki-laki yang suportif tidak dapat diremehkan (Celis dkk, 2008). Mengingat temuan bahwa RUU isu perempuan memiliki peluang lebih besar untuk berhasil jika disponsori oleh laki-laki, aliansi strategis menjadi kunci untuk meminjam legitimasi dan pengaruh dalam sistem yang ada. Terakhir, hubungan simbiosis antara politisi perempuan di dalam parlemen dan gerakan perempuan di masyarakat sipil sangatlah krusial (Celis, 2008). Gerakan sosial dapat memberikan tekanan dari luar, melakukan penelitian, membangun kesadaran publik, dan memberikan dukungan politik yang dibutuhkan oleh para legislator di dalam untuk memperjuangkan undang-undang yang transformatif. Kombinasi dari agensi individu yang berani, organisasi kolektif yang solid, aliansi strategis, dan tekanan dari masyarakat sipil inilah yang menawarkan jalan paling menjanjikan untuk menantang dan pada akhirnya membongkar patriarki politik.

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Tinjauan literatur kritis ini secara komprehensif menjawab pertanyaan tentang mengapa peningkatan kehadiran perempuan di parlemen (keterwakilan deskriptif) seringkali gagal diterjemahkan menjadi keberpihakan kebijakan yang bermakna bagi perempuan (keterwakilan substantif). Literatur akademik menunjukkan bahwa kegagalan transformasi ini bukanlah anomali, melainkan konsekuensi logis dari operasionalisasi sistem patriarki politik yang mengakar kuat di dalam institusi parlemen. Hambatan yang dihadapi perempuan bersifat sistemik, multidimensional, dan saling memperkuat. Secara struktural, parlemen didesain dengan arsitektur kekuasaan maskulin. Partai politik bertindak sebagai *gatekeeper* yang bias, sementara jaringan informal *boys' club* yang eksklusif dan seringkali korup mengontrol akses terhadap sumber daya dan kekuasaan. Setelah terpilih, perempuan mengalami marginalisasi institusional, di mana mereka ditempatkan pada posisi dan komite yang kurang strategis. Lebih jauh, kekerasan dan intimidasi digunakan sebagai alat brutal untuk membungkam dan menghalangi partisipasi mereka.

Secara diskursif, wacana kekuasaan di parlemen melanggengkan norma-norma maskulin. Budaya debat yang konfrontatif menempatkan perempuan dalam posisi dilematis, sementara representasi media yang stereotipikal secara konsisten mendelegitimasi otoritas dan kompetensi mereka. Puncaknya, isu-isu perempuan seperti agenda kebijakan yang menjadi inti dari ekspektasi keterwakilan substantif secara sistematis dibingkai sebagai isu sekunder dan memiliki tingkat keberhasilan legislatif yang jauh lebih rendah, terutama jika diusung oleh legislator perempuan sendiri. Sinergi negatif antara hambatan struktural dan diskursif ini menciptakan sebuah sistem yang sangat resilien terhadap perubahan. Hal ini menjelaskan mengapa pendekatan yang hanya berfokus pada peningkatan angka, seperti yang diimplikasikan oleh teori *critical mass*, terbukti tidak cukup. Transformasi sejati dari kehadiran menjadi pengaruh menuntut lebih dari sekadar



memenuhi kuota; ia menuntut pembongkaran fundamental terhadap struktur dan budaya patriarki yang menopang institusi parlemen.

Saran

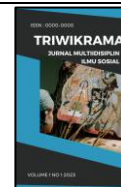
- a. Pemerintah dan parlemen harus bergerak melampaui sekadar penerapan kuota pencalonan. Reformasi harus menargetkan aturan dan budaya internal parlemen untuk menciptakan lingkungan yang *gender-sensitive*.⁶⁴ Ini termasuk mengadopsi dan menegakkan kode etik yang melarang keras segala bentuk kekerasan, pelecehan, dan ujaran kebencian berbasis gender, dengan mekanisme pelaporan yang jelas dan sanksi yang tegas. Selain itu, perlu dipertimbangkan penyediaan fasilitas yang ramah keluarga (misalnya, ruang laktasi) dan penyesuaian jadwal sidang agar lebih akomodatif bagi legislator yang memiliki tanggung jawab pengasuhan.
- b. Politisi perempuan harus secara proaktif memperkuat kaukus perempuan lintas partai sebagai platform strategis untuk membangun agenda bersama, berbagi informasi, dan melakukan lobi kolektif. Membangun aliansi dengan kolega laki-laki yang progresif juga merupakan strategi kunci untuk memperluas basis dukungan dan meningkatkan peluang keberhasilan legislatif.
- c. Penelitian di masa depan perlu bergerak melampaui analisis gender yang monolitik. Diperlukan studi kualitatif yang mendalam untuk memahami bagaimana identitas lain seperti ras, etnis, kelas sosial, dan orientasi seksual beririsan dengan gender dalam membentuk pengalaman, hambatan, dan strategi politisi perempuan di parlemen.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aberth, W. A. V. P. (2024). *Tingkatkan kesetaraan gender: Lebih dari 20% anggota legislatif adalah perempuan*. GoodStats. <https://data.goodstats.id/statistic/tingkatkan-kesetaraan-gender-lebih-dari-20-anggota-legislatif-adalah-perempuan-MvMWA>
- Alfath, R. (2020). Representasi perempuan dalam pemilihan umum 2019 di Kota Bekasi. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(1), 1-13. <https://doi.org/10.31289/akp.v5i1.2878>
- Anggita, T., & Ratnawati. (2023). Affirmative action dan peran perempuan dalam struktural partai: Studi kasus PDI Perjuangan Kota Yogyakarta. *Jurnal Governance*, 9(1), 25-39. <https://doi.org/10.33300/jig.v9i1.334>
- Broadbent, L. (2019). *Female representation and the substantive representation of women's interests by male MPs* [Unpublished master's thesis]. London School of Economics and Political Science. <https://www.lse.ac.uk/government/Assets/Documents/pdf/masters/2019/PKU-Luxia-Broadbent-2018-19.pdf>
- Cahyowirawan, A. M. D., Maulana, I., Denisnawa, F. A., & Ummah, A. (2025). Dampak Kuota Gender Dalam Keterwakilan Politik: Analisis Kasus Kuota 30% Untuk Perempuan Di Parlemen Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(1. D), 28-38. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9727>
- Celis, K. (2008). Studying women's substantive representation in legislatures: When representative acts, contexts and women's interests become important. *Representation*, 44(2), 111-123. <https://doi.org/10.1080/00344890802079516>
- Celis, K., Childs, S., Kantola, J., & Krook, M. L. (2008). Rethinking women's substantive representation. *Representation*, 44(2), 99-110. <https://doi.org/10.1080/00344890802079573>

*Corresponding author

E-mail addresses: kusumadewi022@student.unud.ac.id



- Childs, S., & Krook, M. L. (2006). *The substantive representation of women* [Paper presentation]. MPSA 64th Annual National Conference, Chicago, IL, United States. http://mlkrook.org/doc/Childs_and_Krook_MPSA_2006.doc
- Childs, S., & Krook, M. L. (2009). Analysing women's substantive representation: From critical mass to critical actors. *Government and Opposition*, 44(2), 125-145. <https://doi.org/10.1111/j.1477-7053.2009.01279.x>
- Corbett, C., Voelkel, J. G., Cooper, M., & Willer, R. (2022). Pragmatic bias impedes women's access to political leadership. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 119(6). <https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2112616119>
- Cullen, Z. B., & Perez-Truglia, R. (2021). *The old boys' club: Schmoozing and the gender gap*. UCLA Anderson Review. https://anderson-review.ucla.edu/wp-content/uploads/2021/03/Cullen-Perez-Truglia_GenderGap_2019SSRN-id3493478.pdf
- Fleschenberg, A., & Bari, F. (2015). *Unmaking political patriarchy through gender quotas?* Heinrich-Böll-Stiftung. https://www.boell.de/sites/default/files/unmaking_political_patriarchy_through_gender_quotas1.pdf
- FREE Policy Briefs. (2021). *Why are women underrepresented in politics: Exploring causes and solutions*. <https://freepolicybriefs.org/2021/03/08/women-in-politics/>
- Inter-Parliamentary Union. (2025). *Parliamentary gender gap narrowed over the past 30 years but progress stalled in 2024*. <https://www.ipu.org/news/press-releases/2025-03/ipu-report-parliamentary-gender-gap-narrowed-over-past-30-years-progress-stalled-in-2024>
- Itzkovitch-Malka, R., & Oshri, O. (2025). The weight on her shoulders: Marginalization of women legislators in parliaments and substantive representation of women. *British Journal of Political Science*, 55(4), 1153-1171. <https://doi.org/10.1017/S000712342400037X>
- Komisi Pemilihan Umum. (2019). *Perempuan Dalam Pemilu 2019, Antara Harapan dan Kenyataan*. <https://www.kpu.go.id/berita/baca/7829/perempuan-dalam-pemilu-2019-antara-harapan-dan-kenyataan>
- O'Brien, D. Z., & Bjarnegård, E. (2021). Boys' club or good ol' boys club? Corruption and the substantive representation of women. *Parliamentary Affairs*, 74(2), 314-333. <https://doi.org/10.1093/pa/gsz061>
- Ozer A. L. (2023). Women Experts and Gender Bias in Political Media. *Public opinion quarterly*, 87(2), 293-315. <https://doi.org/10.1093/poq/nfad011>
- Parliamentarians for Global Action. (2023). 3. The participation of women in politics. In *The Parliamentary Toolbox for Democracy Defense*. <https://www.pgaction.org/dgi/drhr/parliamentary-toolbox-for-democracy-defense/women-in-politics.html>
- Perpustakaan DPR RI. (2024). *Caleg perempuan yang tak kuat modal finansial dan sosial akhirnya kalah dari caleg bermodal kuat*. <https://perpustakaan.dpr.go.id/epaper/index/popup/id/18972>
- Rifaldi, M. (2023). *Efektivitas pelaksanaan fungsi anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sigi* [Skripsi, Universitas Tadulako]. Repositori Universitas Tadulako. <http://36.95.239.66/1531/>
- Shaw, B. (2013). *An analysis of dominant discourses in national parliamentary debate using symbolic interactionism* [Doctoral dissertation, Texas Tech University]. Texas Tech University Institutional Repository.
- Shaw, S. (1998). *Language and gender in political debates in the House of Commons Volume 1: Text* [Doctoral dissertation, University College London]. UCL Discovery.



- Shaw, S. (2000). Language, gender and floor apportionment in political debates. *Discourse & Society*, 11(3), 401-418. <https://doi.org/10.1177/0957926500011003006>
- Sibarani, R. E. H. (2024). Perbandingan pengaturan kuota pemilihan perempuan dan kondisi keterwakilan perempuan di parlemen: Studi kasus Indonesia, Timor-Leste, dan Finlandia. *The Indonesian Journal of Socio-Legal Studies*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.54828/ijsls.2024v3n2.2>
- Trabelsi, M. (2023). *Women in politics and the media*. International IDEA. <https://www.idea.int/news/women-politics-and-media>
- UN Women. (2024). *Why so few women are in political leadership, and five actions to boost women's political participation*. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/explainer/2024/09/five-actions-to-boost-womens-political-participation>
- UN Women. (2025). *Political leadership roles in 2025: Men continue to dominate*. <https://www.unwomen.org/en/news-stories/press-release/2025/03/political-leadership-roles-in-2025-men-continue-to-dominate>
- UN Women. (2025). *Women in politics: 2025*. <https://www.unwomen.org/en/digital-library/publications/2025/03/women-in-politics-map-2025>
- Van der Pas, D. J., & Aldering, L. (2020). Gender differences in political media coverage: A meta-analysis. *Journal of Communication*, 70(1), 114-143. <https://doi.org/10.1093/joc/jqz046>
- Volden, C., Wiseman, A. E., & Wittmer, D. E. (2018). Women's issues and their fates in the US Congress. *Political Science Research and Methods*, 6(4), 679-696. <https://doi.org/10.1017/psrm.2016.32>
- Wängnerud, L. (2009). Women in parliaments: Descriptive and substantive representation. *Annual Review of Political Science*, 12, 51-69. <https://doi.org/10.1146/annurev.polisci.11.053106.123839>
- Zuniati, A. R., Maulidza, R., Sabilla, N., & Ummah, A. (2024). Komparasi Implementasi Partisipasi Perempuan dan Sistem Pemilu di Negara Indonesia dan Australia. *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, 10(1). <https://doi.org/10.37058/jipp.v10i1.10862>